

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM,  
DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP BELANJA MODAL  
PADA KABUPATEN DAN KOTA DI JAWA TENGAH TAHUN 2011-  
2014**

***THE IMPACT OF LOCALLY-GENERATED REVENUE, GENERAL ALLOCATION  
FUND, AND SPECIAL ALLOCATION FUNDS TOWARD CAPITAL EXPENDITURE  
OF DISTRICTS AND CITIES IN CENTRAL JAVA IN 2011-2014***

Oleh: **Santika Adhi Karyadi**

Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

[santikaadhi8@gmail.com](mailto:santikaadhi8@gmail.com)

**Abdullah Taman**

Staf Pengajar Jurusan Pendidikan Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta

**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Perusahaan Kabupaten dan Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi. Uji prasyarat analisis data menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heterokedastisitas, dan uji autokorelasi. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linier sederhana dan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan, Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif namun tidak signifikan, dan secara bersama-sama semua variabel independen berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata kunci: Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus , Belanja Modal.

**Abstract**

*The aims of this research are to describe the impacts of the Locally-Generated Revenue, General Allocation Fund, and Special Allocation Funds toward Capital Expenditure of Districts and Cities in Central Java in 2011-2014. This research is a quantitative research. Documentation method was used in this research. Precondition test analysis were conducted through normality test, multicollinearity, autocorrelation, and heteroscedasticity tes. Also, hypothesis testing in this reaserch used linier regression equatio and multiple linier regressions. Result research shown that Locally-Generated Revenue and General Allocation Fund have positive and significant effect, Special Allocation Funds has positive but not significant effect, and together all the independent variables have a positive and significant effect on Capital Expenditure.*

**Keywords:** *Locally-Generated Revenue, General Allocation Fund, Special Allocation Funds, Capital Expenditure.*

## PENDAHULUAN

Kebijakan otonomi daerah dicanangkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Selain itu juga terdapat pada Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004. Dalam undang-undang tersebut diamanatkan bahwa suatu daerah diberikan kewenangan otonomi agar melaksanakan pembangunan di segala bidang dan diharapkan dilaksanakan secara mandiri oleh daerah, baik dari segi perencanaan, pembangunan, serta pembiayaannya. Kewenangan tersebut bertujuan untuk lebih mendekatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, dan memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol penggunaan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menyebutkan bahwa daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besarnya alokasi sumber daya ke dalam Belanja Modal dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah daerah bekerjasama dengan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan kebijakan Umum (KUA) APBD dan prioritas serta plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai petunjuk dalam pengalokasian sumber daya dalam APBD.

Belanja Modal merupakan komponen belanja langsung dalam anggaran pemerintah yang menghasilkan *output* berupa aset tetap (Syukriy Abdullah). Belanja Modal sangat berhubungan dengan perencanaan keuangan jangka panjang, terutama pembiayaan untuk pemeliharaan aset tetap yang dihasilkan dari Belanja Modal tersebut. Menurut konsep *Multi-Term Expenditure Framework* (MTEF), kebijakan Belanja Modal harus memperhatikan kemanfaatan (*usefulness*) dan kemampuan keuangan pemerintah daerah (*budget capability*) dalam pengalokasian aset tersebut dalam jangka panjang (Allen dan Tommasi, 2001).

Pemerintah daerah mengalokasikan dana dalam bentuk anggaran Belanja Modal dalam APBD untuk menambah aset tetap. Alokasi Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik.

Oleh karena itu, dalam upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, pemerintah daerah seharusnya mengubah komposisi belanjanya. Selama ini belanja daerah lebih digunakan untuk belanja rutin yang relative kurang produktif. Juli Panglima Sarangih (2003) menyatakan bahwa pemanfaatan belanja hendaknya dialokasikan untuk hal-hal produktif misalnya untuk melakukan aktivitas pembangunan. Menurut data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pada tahun 2010 sampai 2014 memperlihatkan belanja pegawai masih mendominasi struktur belanja daerah dengan rata-rata dari 2010 sampai 2014 sebesar 43,75 persen sedangkan porsi Belanja Modal rata-ratanya hanya 23,92 persen (republika.co.id). Hal ini menunjukkan bahwa Belanja Modal yang seyogianya berpengaruh besar terhadap pembangunan justru mendapatkan porsi kecil.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 menyatakan bahwa yang menjadi sumber-sumber pembiayaan antara lain berasal dari Pendapatan Asli Daerah dan dana perimbangan yang diterima oleh daerah-daerah dari pemerintah pusat. Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah (Mardiasmo; 2002). Pendapatan Asli Daerah ini terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Menurut Mardiasmo (2002) saat ini masih banyak masalah yang dihadapi pemerintah daerah terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan daerah, keterbatasan sarana dan prasarana yang tidak mendukung untuk investasi menimbulkan pertanyaan bagaimana sebenarnya PAD terhadap Belanja Modal, apakah karena PAD yang rendah atau alokasi yang kurang tepat. Dari data Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa kenaikan Pendapatan Asli Daerah tidak selalu terjadi kenaikan Belanja Modal di beberapa Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah seperti Kabupaten Banjarnegara dan Kota Magelang.

Salah satu dana perimbangan dari pemerintah adalah Dana Alokasi Umum. Belanja Modal merupakan bagian dari belanja daerah yang juga didanai dari Dana Alokasi Umum dan diperhitungkan oleh pemerintah daerah dalam Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah. Dana Alokasi Umum ini menekankan aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintah. Dengan adanya transfer dari pusat yang berupa Dana Alokasi umum ini diharapkan agar pemerintah daerah mampu mengalokasikan Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh untuk membiayai Belanja Modal di daerahnya. Dari data Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal Provinsi Jawa Tengah antara tahun 2011-2014 menunjukkan bahwa kenaikan DAU tidak selalu terjadi kenaikan Belanja Modal di beberapa Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah seperti Kabupaten Banjarnegara dan Kota Magelang.

Dana perimbangan selain Dana Alokasi Umum adalah Dana Alokasi Khusus. Dana Alokasi Khusus juga merupakan dana transfer yang diterima dari pemerintah pusat. Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus ini hanya digunakan untuk kegiatan pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, infrastruktur jalan

dan jembatan, infrastruktur irigasi, infrastruktur air minum dan sanitasi, prasarana pemerintah daerah, lingkungan hidup, kehutanan, sarana dan prasarana pedesaan, perdagangan, pertanian serta perikanan dan kelautan yang semuanya itu termasuk dalam Belanja Modal. Pemerintah daerah diwajibkan untuk mengalokasikan dana pendamping sebesar 10% dari nilai Dana Alokasi Khusus yang diterimanya untuk kegiatan fisik.

Gambaran Dana Alokasi Khusus secara umum masih memiliki banyak kendala. Program Dana Alokasi Khusus telah menyalurkan dana untuk percepatan di 19 bidang pembangunan yang menyentuh kepentingan masyarakat Indonesia. Besaran Dana Alokasi Khusus dari tahun ke tahun juga meningkat. Untuk tahun 2013 sebesar 31,697 Trilyun meningkat menjadi 33 Trilyun di tahun 2014. Dalam pelaksanaan di daerah ditemukan banyak kendala, sehingga serapan dana DAK maupun kinerja fisik kegiatan belum dapat dikatakan maksimal. Di lain hal, penyerapan program DAK terserap realisasinya rendah dan lambat.

Selain Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil juga merupakan dana perimbangan. Dana

Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana Bagi Hasil terdiri dari dua jenis yaitu DBH pajak dan DBH Bukan Pajak. Dana Bagi Hasil ini merupakan sumber pendapatan daerah yang cukup potensial dan menjadi salah satu modal dasar pemerintah daerah dalam mendapatkan dana pembangunan dan memenuhi belanja daerah.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Modal dengan judul “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014”.

## **METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yaitu penelitian yang dimana adata yang diperoleh diwujudkan dalam bentuk angka-angka, mulai dari

pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut,serta penampilan dari hasil penelitian ini diwujudkan dalam bentuk angka .penelitian ini merupakan penelitian kausal komparatif berusaha menguraikan peristiwa yang telah terjadi dengan menelisik kebelakang untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan peristiwa tersebut terjadi. Penelitian kausal komparatif adalah penelitian yang berusaha mengamati alasan atau penyebab terjadinya sebuah fenomena yang diteliti (Kuncoro, 2003 : 251).

### **Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan mengambil data laporan realisasi APBD selama periode 2011-2014. Data penelitian diunduh dari situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id) . Adapun waktu penelitian dimulai dari bulan Februari hingga April 2017.

### **Definisi Operasional Variabel**

#### **Variabel Dependen**

#### **Belanja Modal (Y)**

Belanja Modal adalah pengeluaran untuk perolehan aset tetap yang memberikan manfaat lebih dari satu

periode akuntansi. Belanja Modal dihitung dengan menambahkan semua indikator belanja modal yaitu belanja tanah, belanja peralatan mesin, Belanja Modal gedung dan bangunan, Belanja Modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

### **Variabel Independen**

#### **Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>)**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan dari sumber-sumber daerah sendiri, yang dipungut berdasar peraturan daerah dengan peraturan perundang-undang yang berlaku yang terdiri dari Hasil Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba Perusahaan Daerah dan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan Asli Daerah dapat dihitung dengan menjumlahkan total pajak daerah, total retribusi daerah, total hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

#### **Dana Alokasi Umum (X<sub>2</sub>)**

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana

Alokasi Umum Kabupaten/Kota dihitung dengan rumus:  $90\% \times 25\% \times \text{Pendapatan Dalam Negeri} \times \text{Bobot DAU}$ .

#### **Dana Alokasi Khusus (X<sub>3</sub>)**

Dana Alokasi Khusus (DAK) merupakan salah satu dana yang berasal dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus dari masing-masing pemerintah kabupaten dan kota dapat dilihat dari pos dana perimbangan dalam Laporan Realisasi APBD.

#### **Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus pada pemerintah daerah kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Tengah yang meliputi 23 daerah Kabupaten dan 5 daerah Kota sehingga total populasi adalah 28 data. Pada penelitian ini sampel diambil dengan metode sampling jenuh. Menurut Sugiyono (2011:85) Sampling Jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Penelitian ini mengambil data pada tahun 2011-2014, dengan jumlah sampel sebanyak

32 daerah. Maka jumlah sampel penelitian keseluruhan menjadi  $4 \times 28 = 112$  data.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi. Metode ini digunakan untuk memperoleh data mengenai data PAD, DAU, DAK dan Belanja Modal dalam laporan Realisasi APBD Tahun Anggaran 2011-2014. Data tersebut diperoleh dari situs Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)).

### **Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan bantuan *software* SPSS versi 20. Adapun jenis analisis yang dipergunakan meliputi uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan regresi linear.

#### **Uji Asumsi Klasik**

##### **Uji Normalitas**

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Seperti diketahui uji t dan F mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil. Uji statistik

yang digunakan untuk menguji normalitas residual adalah dengan uji statistik *non parametrik* Kolmogorov-Sminov (Imam Ghazali 2011:160). Metode yang lebih handal adalah *normal probability plot* yang membandingkan dari distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data normal, maka garis yang menggambarkan data yang sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

##### **Uji Multikolinieritas**

Uji multikolinieritas diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya variabel independen yang memiliki kemiripan dengan variabel independen lain dalam satu model (Bhuono Agung, 2005:58). Kemiripan antarvariabel independen dalam suatu model akan menyebabkan terjadinya korelasi yang sangat kuat antara suatu variabel independen dengan variabel independen yang lain. Dikatakan terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih besar dari 0,60. Dikatakan tidak terjadi multikolinieritas jika koefisien korelasi antar variabel bebas lebih kecil atau sama dengan 0,60 ( $r \leq 0,60$ ) (Sunnyoto, 2007:89).

### **Uji Autokorelasi**

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier ada korelasi antar kesalahan pengganggu pada periode  $t-1$  (sebelumnya). Adapun uji yang digunakan untuk mencari masalah autokorelasi ini adalah uji *Durbin-Watson (DW test)*. *DW test* digunakan untuk korelasi tingkat satu dan mensyaratkan adanya konstanta dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi diantara variabel independen. Uji ini membandingkan antara hasil *DW* statistik dengan *DW* tabel.

### **Uji Heteroskedastisitas**

Adapun uji heteroskedastisitas yang dilakukan dalam penelitian ini adalah Uji Glejser. Uji ini dilakukan dengan mengkorelasikan nilai absolut residual dengan masing-masing variabel independen (Ghozali, 2011:142). Apabila nilai signifikansi pada uji  $t$  kurang dari 0,05 maka terdapat indikasi masalah heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

### **Uji Hipotesis**

#### **Analisis Regresi Linear Sederhana**

Analisis regresi linier sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2009:261). Analisis regresi linier sederhana ini digunakan untuk

menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal secara parsial.

#### **Analisis Regresi Berganda**

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui besarnya pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Analisis digunakan untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal. Uji signifikansi regresi berganda menggunakan uji  $F$ . Uji  $F$  digunakan untuk menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan kedalam model memiliki pengaruh bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat (Ghozali: 2011,98). Pengambilan keputusan perhitungan uji  $F$  dilakukan dengan membandingkan  $F_{hitung}$  dengan  $F_{tabel}$ . Jika  $F_{hitung}$  sama dengan atau lebih besar dibandingkan dengan  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5%, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen signifikan. Sebaliknya, apabila  $F_{hitung}$  lebih kecil dari  $F_{tabel}$  pada tingkat signifikansi 5%, maka pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen tidak signifikan.



**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Hasil Uji Asumsi Klasik**

Sebelum uji hipotesis dilakukan uji asumsi klasik terlebih dahulu untuk memastikan data memenuhi persyaratan untuk diuji regresi. Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi: uji normalitas, multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas

**Uji Normalitas**

Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov

		<i>Unstandardized Residual</i>
N		112
Normal	Mean	0E-7
Parameter	Std.	
$s^{a,b}$	Deviation	54401.89817859
Most	Absolute	0,079
Extreme	Positive	0,079
Difference	Negative	-0,042
$s$		
Kolmogorov-Smirnov Z		0,838
Asymp. Sig. (2-tailed)		0,484

Berdasarkan Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel diatas, nilai Kolmogorov-Smirnov 0,838 dengan probabilitas signifikansi 0,484 lebih dari  $\alpha = 0,05$ , berarti data terdistribusi secara normal, dan model regresi ini memenuhi uji normalitas.

**Uji Multikolinearitas**

Tabel 2 Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	DAK	PAD	DAU
DAK	1,000	0,161	
PAD	0,161	1,000	-0,457
DAU		-0,457	1,000

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas menunjukkan bahwa nilai korelasi dari ketiga variabel independen, yaitu pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus diatas lebih kecil dari 0,60. Menurut hasil tersebut dapat dikatakan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen.

**Uji Autokorelasi**

Tabel 3 Hasil Uji Autokorelasi

Model	Durbin-Watson
1	1,856

Dengan nilai tabel pada tingkat signifikansi 5% jumlah data (n) 112 dan jumlah variabel independen 3 (k=3), maka dari tabel Durbin-Watson akan didapatkan nilai batas atas (dU) 1,7472 dan batas bawah (dL) 1,6373. Karena nilai DW 1,856 lebih besar dari batas atas (dU) 1,7472 dan kurang dari 4-1,7472 (4-dU), maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat autokorelasi pada model regresi ini.

**Uji Heteroskedastisitas**

Tabel 4 Uji Heteroskedastisitas

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	13393,269	11449,886		1,170	0,245
PAD	0,033	0,024	0,142	1,368	0,174
DAU	0,032	0,016	0,207	1,952	0,054
DAK	-0,032	0,045	-0,068	-0,717	0,475

Dari output diatas dapat diketahui bahwa nilai signifikansi ketiga variabel independen lebih dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

### Hasil Uji Hipotesis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Kebijakan Dividen Tunai

Tabel 5 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Pendapatan Asli Daerah

Variabel	Koefisien Regresi	$r_{xy}$	$r^2_{xy}$	Sig	$t_{hitung}$	Keterangan
Konstanta	106.197,036			0,000	11,027	
PAD (X <sub>1</sub> )	0,552	0,783	0,614	0,000	13,217	Signifikan

Berdasarkan hasil uji tersebut, nilai Koefisien regresi sebesar 0,552. menunjukkan bahwa apabila Pendapatan Asli Daerah meningkat sebesar 1 persen maka Belanja Modal akan meningkat sebesar 0,552 persen dengan asumsi variabel bebas yang lain konstan. Koefisien determinasi ( $r^2_{x_1y}$ ) sebesar 0,614. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 dan nilai  $t_{hitung}13,217 > t_{tabel} 1,98137$  menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (X<sub>1</sub>) signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

### Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal

Tabel 6 Hasil Uji Regresi Linier Sederhana Variabel Dana Alokasi Umum

Variabel	Koefisien Regresi	$r_{xy}$	$r^2_{xy}$	Sig	$t_{hitung}$	Keterangan
Konstanta	-37.702,379			0,169	-1,385	
DAU (X <sub>2</sub> )	0,314	0,658	0,433	0,000	9,168	Signifikan

Berdasarkan hasil uji tersebut diperoleh angka koefisien korelasi ( $r_{x_2y}$ ) sebesar 0,658. Koefisien determinasi ( $r^2_{x_2y}$ )sebesar 0,433 yang berarti 43,3% variasi pada variabel dependen Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Dana Alokasi Umum, sedangkan sisanya 56,7% dipengaruhi oleh variabel lain selain Dana Alokasi Umum. Nilai signifikansi sebesar 0,000, nilai ini lebih rendah dibandingkan dengan 0,05 dan nilai  $t_{hitung}9,168 > t_{tabel}1,98137$  menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (X<sub>2</sub>) signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

### Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal

Tabel 7 Hasil Uji regresi Linier Sederhana Variabel Dana Alokasi Khusus

Variabel	Koefisien Regresi	$r_{x_3y}$	$r^2_{x_3y}$	Sig	$t_{hitung}$	Keterangan
Konstanta	184.578,857			0,000	13,236	
DAK (X <sub>3</sub> )	0,240	0,166	0,028	0,080	1,770	Tidak Signifikan

Berdasarkan hasil uji tersebut diperoleh nilai Koefisien regresi sebesar 0,240. Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) mempunyai pengaruh positif terhadap Belanja Modal (Y), ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $r_{x_3y}$ ) sebesar 0,166. Koefisien determinasi ( $r^2_{x_3y}$ ) sebesar 0,028 yang berarti 2,8% variasi pada variabel dependen Belanja Modal dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen Dana Alokasi Khusus, sedangkan sisanya 97,2% dipengaruhi oleh variabel lain selain Dana Alokasi Khusus. Nilai signifikansi sebesar 0,080, nilai ini lebih tinggi dibandingkan dengan 0,05 dan nilai  $t_{hitung} 1,770 < t_{tabel} 1,98137$  menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus ( $X_3$ ) tidak signifikan terhadap Belanja Modal (Y).

**Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama terhadap Belanja Modal**

Tabel 8. Rangkuman Hasil Uji Regresi Linier Berganda Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Variabel Dana Alokasi Khusus (DAK) secara bersama-sama terhadap Variabel Belanja Modal

Variabel Independen	Koefisien Regresi	$R_y(123)$	$R^2_{y(1,2,3)}$	Sig	$F_{hitung}$	Keterangan
Konstanta	-15,527,134					
PAD ( $X_1$ )	0,446	0,864	0,747	0,000	106,184	Signifikan
DAU ( $X_2$ )	0,167					
DAK ( $X_3$ )	0,182					

Berdasarkan hasil uji diperoleh hasil pengujian statistik dengan uji F diterangkan melalui  $F_{tabel}$  sebesar 2,69 dan  $F_{hitung}$  sebesar 106,184, maka  $F_{hitung} > F_{tabel}$  artinya secara bersama-sama seluruh variabel independen Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal.

**Keterbatasan**

Penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan, antara lain:

1. Peneliti hanya mengambil 3 variabel independen yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana

Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus.

2. Periode yang diambil penelitian ini terbatas, sehingga penelitian ini dilakukan dalam periode empat tahun yaitu tahun 2011-2014.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis data dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien koeralasi ( $r_{x_1y}$ ) sebesar 0,783 dan koefisien determinasi ( $r^2_{x_1y}$ ) sebesar 0,614. Nilai  $t_{hitung} 13,217 > t_{tabel} 1,98137$ .
2. Dana Alokasi Umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien koeralasi ( $r_{x_2y}$ ) sebesar 0,658 dan koefisien determinasi ( $r^2_{x_2y}$ ) sebesar 0,433. Nilai  $t_{hitung} 9,168 > t_{tabel} 1,98137$ .
3. Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan

Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien koeralasi ( $r_{x_3y}$ ) sebesar 0,166 dan koefisien determinasi ( $r^2_{x_3y}$ ) sebesar 0,028. Nilai  $t_{hitung} 1,770 < t_{tabel} 1,98137$ .

4. Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014. Hal ini ditunjukkan dengan angka koefisien korelasi ( $R_{y(1,2,3)}$ ) sebesar 0,864 dan koefisien determinasi ( $R^2_{y(1,2,3)}$ ) sebesar 0,747. Nilai  $F_{hitung}$  sebesar  $106,184 > F_{tabel} 2,69$ .

### **Saran**

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan serta keterbatasan penelitian di atas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah daerah diharapkan dapat terus menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah agar bermanfaat dalam pendanaan untuk meningkatkan mutu dari pelayanan publik di daerah. Pemerintah daerah juga diharapkan mampu mengelola dan

memanfaatkan sepenuhnya Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi khusus dengan baik untuk meningkatkan mutu pelayanan publik.

2. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah cakupan daerah kabupaten dan kota khususnya selain di Provinsi Jawa Tengah supaya hasil dari penelitian yang dilakukan lebih representatif.
3. Variabel yang digunakan dalam penelitian yang akan datang diharapkan lebih lengkap dan bervariasi dengan menambah variabel independen lain.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bhuono Agung. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian dengan SPSS*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari.(2007). *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal*. Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar.
- Dermawan Wibisono. (2014). *Panduan Penyusunan Skripsi, Tesis, dan Disertasi*. Yogyakarta: penerbit Andi.
- Duwi Priyatno. (2013). *Olah Data Statistik Dengan Program PSPP*. Yogyakarta: Penerbit Mediakom.
- Hadi, S. (2004). *Analisis Regresi*. Andi Offset: Yogyakarta.
- Halim, Abdul. (2007). *Akuntansi Sektor Publik Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Harianto, D. & Adi, P.H. (2007). *Hubungan antara Dana Alokasi Umum, Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, dan Pendapatan Per-Kapita*. SNA X Unhass Makasar 26-28 Juli 2007.
- Imam Ghozali. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Edisi V. Badan Penerbit UNDIP. Semarang.
- Irsyadi, M.A. (2014). *Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Alokasi Belanja Modal (Studi Empiris pada kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah)*. Naskah Publikasi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Kemenkeu.(2004). *Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- Kemenkeu.(2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan*.
- Kemenkeu DJPK. [http://www.djpk.depkeu.go.id/?page\\_id=316](http://www.djpk.depkeu.go.id/?page_id=316). Pada tanggal 29 Desember 2016.
- \_\_\_\_\_. “Dana Alokasi Umum: Selayang Pandang”. <http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/DAU.pdf>. Pada tanggal 29 Desember 2016.
- Mardiasmo. (2002). *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

- \_\_\_\_\_. (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- Permatasari, I. (2016). *Pengaruh Pendapatan Daerah terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Jawa Timur*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Volume 5, Nomor 1.
- Purwanto, F.P.D. “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal (Studi Kasus Pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011)*”. Skripsi. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Prakosa, B.A. (2004). “*Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empiris Di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY)*”. Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia, Volume 8 No 2, 101-118.
- Putro, N.S. (2008). “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah)*”. Skripsi. Universitas Diponegoro.
- Richard, A. & Tommasi, D. (2001). *Managing Public Expenditure: A Reference Book for Transition Countries*. Paris: OECD
- Sarangih, J.P. (2003). “*Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*”. Jakarta: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Setiawan, A. (2010). “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah (Studi Kasus Pada Provinsi Jawa Tengah)*”. Skripsi. Universitas Negeri Diponegoro. Semarang.
- Sugiyono. (2009). *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: penerbit Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: penerbit Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. (2012). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: penerbit Alfabeta.
- Sularno, F. M. (2013). “*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum terhadap Anggaran Belanja Modal (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat)*”. Skripsi. Universitas Widyatama. Bandung.
- Sumarmi, S. (2009). “*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Alokasi Belanja Modal Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi D.I Yogyakarta*”.
- Sunyoto, D. (2007). *Analisis Regresi dan Korelasi Bivariat Ringkasan dan Kasus*. Yogyakarta: Amara Books.
- Syukriy Abdullah dan Abdul Halim. (2004). “*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan*

*Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Pemerintah Daerah*". Simposium Nasional Akuntansi VI, hal 1140-1159.

Tuasikal, A. (2008). "*Pengaruh DAU, DAK, PAD, dan PDRB Terhadap Belanja Modal Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia*". Jurnal Telaah & Riset Akuntansi Vol.1 No. 2 Juli 2008, hal 142-155.

Undang-undang Nomor 332 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2005 tentang *Dana Perimbangan*.

Wandira, A.G. "*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap Pengalokasian Belanja Modal (Studi Empiris pada Pemerintah Provinsi se Indonesia tahun 2012)*". Skripsi. Universitas Negeri Semarang.  
[www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id). Diakses 24 Desember 2016 pukul 14.15 WIB.

Yani, A. (2004). *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Zuraya, N. (2015). "*Optimalisasi APBD demi Pertumbuhan Daerah*". Diambil dari [www.republika.com](http://www.republika.com). Pada tanggal 10 Februari 2017.